

## DINAMIKA DAN TUNTUTAN MUTU PENDIDIKAN

Suyitno

STIT Misbahul Ulum Gumawang. Jl. Irigasi Desa Tanah Merah Kec. Belintang  
Madang Raya Kabupaten OKU Timur Prov. Sumatera-Selatan  
suyitno@stitmugu.ac.id

### Abstrak

Pendidikan dalam masyarakat modern dewasa ini, seperti di Indonesia telah menjadi wacana publik. Terlepas dari itu semua, pada era globalisasi ini setidaknya telah membuka wawasan bagi seluruh masyarakat Indonesia, baik masyarakat modern atau masyarakat tradisional terkait pentingnya dua domain publik yaitu politik dan pendidikan yang satu sama lain selalu saling memandang, saling membutuhkan, bersinergi dan saling mempengaruhi satu sama lain bahkan tidak pernah berpisah dan tidak dapat terpisahkan.

Pendidikan adalah salah satu kunci untuk membuka wawasan masyarakat. Oleh karenanya proses pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku politik masyarakat. Begitu pula sebaliknya, bahwa proses politik masyarakat akan membawa dampak besar pada karakteristik pendidikan. Masyarakat harus paham betul pentingnya politik pendidikan karena muara politik pendidikan menuju kepada kebijakan pendidikan, bukan semata-mata politisasi pendidikan.

Hal ini perlu dipertegas karena bagi masyarakat kecil atau tradisional beranggapan bahwa politik adalah kotor dan lain sebagainya. Sehingga masih menjadi perdebatan apakah dalam dunia pendidikan ada yang menggunakan politik atau tidak. Setelah kita mengetahui arti dari politik pendidikan, maka pada bagian pembahasan berikutnya akan ditampilkan topik tentang dinamika hubungan politik pendidikan Islam, kemudian prinsip-prinsip hubungan politik pendidikan Islam.

**Kata Kunci: Dinamika, Politik dan Pendidikan Islam**

### A. PENDAHULUAN

Dinamika Hubungan Politik Pendidikan Islam di banyak negara maju berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat, pola hubungan politik dan pendidikan Islam umumnya sama dengan hubungan pendidikan dan politik di negara-negara Barat. Kedudukan politik di dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, syari'at Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk

mempertahankan syiar Islam. Pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan syari'at. Umat tidak akan mengerti syari'at tanpa adanya pendidikan.

Mutu Pendidikan/Kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. Standar nasional pendidikan diatas, ada delapan (8) hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu : standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan.

## **B. PEMBAHASAN**

### **1. Dinamika Hubungan Politik Pendidikan Islam**

Jika politik dipahami sebagai “praktik kekuatan atau kekuasaan maka kekuasaan” memiliki dua sifat yaitu mengatur masyarakat secara keseluruhan dan menggunakan kekerasan fisik secara sah disebut kekuasaan politik. Menurut Yaya suryana dan Rusdiana dalam bukunya *“Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip Dan Implementasi”* bahwa orang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan politik disebut penguasa politik, sementara keputusan yang dihasilkan oleh penguasa politik dalam usaha untuk mengatur masyarakat disebut kebijakan politik.<sup>1</sup>

Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik di setiap negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Meskipun pendidikan dan politik berposisi sebagai dua elemen penting dalam sistem sosial politik, namun sering dikaji sebagai bagian-bagian yang terpisah. Tentu saja hal demikian tidak tepat karena pendidikan dan politik bahu membahu dalam proses pembentukan karakteristik masyarakat di suatu negara. Lebih dari itu, satu sama lain

---

<sup>1</sup>. Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan multikultural suatu upaya penguatan jati diri bangsa konsep, prinsip dan implementasi* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), h. 165.

saling menunjang dan saling mengisi. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan ada hubungan erat dan dinamis antara pendidikan dan politik di setiap negara. Hubungan tersebut adalah realitas empiris yang telah terjadi sejak awal perkembangan peradaban manusia dan menjadi perhatian para ilmuwan.

Menurut M. Sirozi, gambaran jelas tentang keterkaitan antara pendidikan dan politik dapat kita telusuri di dunia Islam, dimana sejarah peradaban Islam banyak ditandai oleh kesungguhan para ulama dan umara dalam memperhatikan persoalan pendidikan sebagai upaya untuk memperkuat posisi sosial politik kelompok dan pengikutnya.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga pendidikan merupakan salah satu konstalasi politik. Peranan yang dimainkan oleh masjid-masjid dan madrasah-madrasah dalam mengokohkan kekuasaan politik para penguasa dapat dilihat dalam sejarah. Di lain pihak, ketergantungan pada uluran tangan para penguasa secara ekonomis, membuat lembaga-lembaga tersebut harus sejalan dengan nuansa politik yang berlaku. Diantara lembaga pendidikan Islam yang menjadi corong pesan-pesan politik, menurut Rasyid, adalah madrasah Nizhamiyah di Baghdad.<sup>2</sup>

Hal ini dapat dipahami, karena tujuan pemerintahan Islam, Menurut Abdul Ghaffar Aziz di dalam M. Sirozi, adalah “*menegakkan kebenaran dan keadilan*”. Tujuan itu tidak mungkin tercapai kecuali dengan melaksanakan syari’at. Syari’at tidak akan berjalan bila umat tidak

---

<sup>2</sup>. Madrasah Nizhamiyah didirikan oleh penguasa Bani Saljuk, Nizham Al-Mulk, seorang perdana menteri dari Alp Arselan dan Malik Syah Pada tahun 457 H, setengah abad setelah berdirinya Universitas Al-Azhar di Cairo. Bani Saljuk terkenal sangat fanatik terhadap madzhab sunni. Madrasah Nizhamiyah didirikan di setiap kota di Irak dan Khurasan, untuk mengikis paham syi’ah Zaidiyah yang dikembangkan oleh dinasti Buwaih sebelumnya dan dalam rangka menghadang paham islamiyah yang dipropagandakan oleh dinasti Fatimiyah di Mesir. Selain itu, Tujuan pendirian madrasah oleh Nizham Al-Mulk adalah untuk mencetak birokrat-birokrat yang akan menduduki jabatan kenegaraan, atau paling tidak, melalui lembaga tersebut akan lahir warga negara yang mengerti akan nilai-nilai yang dianut oleh pemerintah. Singkat kata, madrasah Nizhamiyah merupakan instrumen kebijakan politik yang salah satu fungsi utamanya adalah untuk menanamkan doktrin kenegaraan yang memperkuat kerajaan. Patronase Nizam Al-Mulk tidak hanya menyangkut masalah keuangan dan pengadaan sarana, tetapi juga kurikulum dan jabatan “profesorship”, guru besar (Rasyid, 1994: 7-8).

memahami ajaran Islam”.<sup>3</sup> Menurut M. Sirozi, selain karena faktor religius bahwa agama Islam sangat menjunjung aktivitas kependidikan, perhatian besar para pemimpin Islam terhadap masalah pendidikan didorong oleh besarnya peran lembaga-lembaga pendidikan dalam penyampaian misi-misi politik.

Pendidikan sering dijadikan media dan wadah untuk menanamkan ideologi negara atau tulang yang menopang kerangka politik. Sjalabi mencatat bahwa Khalifah Al-Makmun memolitisasi majelis munazharah dalam rangka menyebarkan paham Mu'tazilah sebagai mazab resmi negara waktu itu melalui peristiwa Inquisisi, yaitu penyelidikan atau interogasi (Al-Mihna) terhadap para ulama dan pejabat penting.<sup>4</sup>

Di dalam sejarah Islam tercatat bahwa pusat pendidikan yang pertama kali muncul adalah rumah Arqam Ibn Abi Arqam, yakni ketika Nabi berada di Mekkah<sup>5</sup>. Selanjutnya pada masa Bani Umayyah, lembaga-lembaga pendidikan Islam tersebut sudah lebih variatif dengan lahirnya Kuttab<sup>6</sup> dan dijadikan rumah-rumah pembesar kerajaan sebagai tempat belajar.

---

<sup>3</sup>. Pada periode Mekkah, rumah Arqam Ibn Abi Arqam berfungsi sebagai lembaga pendidikan pertama dalam bentuk yang sederhana, dimana nabi mengajar sahabat-sahabatnya. Pada periode Madinah, aktivitas pendidikan berpusat di masjid-masjid. Pada periode tersebut Khalifah Umar Ibn al-Khattab memerintahkan Abu Musa Al-Asy'ari agar setiap suku mendirikan masjid untuk memperluas jaringan pendidikan Islam. Khalifah-khalifah Bani Umayyah, baik yang di Damaskus maupun di Spanyol berperan penting dalam membangun cakrawala pendidikan Islam (Sjalabi, 1973: 94).

<sup>4</sup>. Bila ditinjau dari sisi aqidah, inquisisi adalah usaha pemurnian pandangan masyarakat. Bagi golongan Mu'tazilah menganggap bahwa Al-Qur'an itu Qadim adalah kafir karena dengan demikian itu seseorang telah menjadikan yang Qadim ada dua. Kekufuran harus dihapus dari pandangan orang Islam. Pejabat negara dan para ulama yang mengatakan bahwa Al-Qur'an Qadim harus disingkirkan, karena mereka adalah termasuk orang kafir (Rasyid, 1994: 18).

<sup>5</sup>. Pada periode Mekkah pusat-pusat pendidikan difokuskan di masjid-masjid. Masjid yang pertamakali didirikan adalah masjid Quba. Di masjid ini diadakan lingkaran-lingkaran belajar (Halaqah) sebagaimana di masjid Nabi di Mirbad Madinah. Untuk menunjang proses pendidikan dan pengajaran di masjid ini, lalu dibangunlah al-Suffah (semacam beranda). Di Al-Suffah ini Rasulullah memberikan pelajaran kepada sahabat dan melatih beberapa orang diantara mereka untuk menjadi guru yang mampu mengajar beberapa pelajaran yang berlainan. Diantara para sahabat yang dilatih di Al-Suffah tersebut ialah Abu Abdullah Ibnu Rowahah, Ubadah Ibnu Shamit, dan Abu Ubaidah Ibnu Jarrah” (Rasyid, 1994: 25).

<sup>6</sup>. Kuttab, menurut Al-Thibawi, merupakan fenomena yang berkembang pada awal abad ke-8 M di penghujung pemerintahan Bani Umayyah. Kuttab ini berfungsi sebagai pusat pendidikan anak-anak kecil, didirikan untuk menghindari mereka dari mengotori masjid (Dalam Rasyid, 1994: 26).

Menurut Rasyid, di dalam M. Sirozi, menyimpulkan bahwa para penguasa Islam senantiasa terlibat langsung dalam persoalan pendidikan. Menurutnya ada dua Alasan utama mengapa para ulama sangat peduli dengan pendidikan. *Pertama*, karena Islam adalah agama yang totaliter jam'i , mencakup semua aspek kehidupan seorang Muslim mulai dari makan dan minum, tatacara berumahtangga, urusan sosial kemasyarakatan, sampai pada ibadah semuanya diatur oleh syari'at. Untuk mengetahui bagaimana hidup yang Islami, seorang Muslim mesti terlibat dalam dunia pendidikan. *Kedua*, karena motivasi politik, sebab politik dan Agama sulit untuk dipisahkan dalam Islam. Para penguasa Muslim sering menjadikan kekuasaan sebagai alat untuk menanamkan paham-paham keagamaan. Inilah yang dilakukan oleh dinasti Buwaih, Fatimiyah dan Khalifah Al-Makmun.

Sedangkan dinamika hubungan politik pendidikan di Indonesia yang notabennya memiliki politik identitas sejak masa pemerintahan orde baru dijalankannya politik penyeragaman. Rakyat tabu membicarakan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA). Pemerintah orde baru memobilisasi isu SARA untuk mengendalikan masyarakat melalui bahasa dan etnisitas. Adapun dinamika politik identitas indonesia tersebut meliputi:

1. Islam di indonesia dipengaruhi corak Islam Jawa. Oleh karena itu, kepercayaan hindu-buddha yang dianut oleh masyarakat sebelum Islam datang sulit dihapuskan, terutama di kalangan masyarakat Jawa walaupun mereka telah menganut Islam.
2. Proses islamisasi di jawa : akar politik identitas Indonesia. Menurut Robert dalam Yaya suryana dan rusdiana, proses islamisasi di jawa melalui dua pola, yaitu; wilayah-wilayah pengaruh nilai-nilai agama hindu budha minimum dan wilayah-wilayah pengaruh nilai-nilai agama Hindu-Buddha kuat.
3. Politisasi agama dengan dinamika kesejarahan : realitas politik identitas Indonesia. Politisasi agama yang terjadi akhir-akhir ini bukanlah hal yang baru, melainkan terkait dengan dinamika kesejarahan Indonesia sejak awal berdiri sampai sekarang.
4. Penguatan politik identitas di Indonesia. Mengutip pernyataan hanneman samuel, seterusnya, tentang terjadinya oenguatan politik indentitas di Indonesia. Dalam satu dekade terakhir ini, telah terlihat

kemajuan dalam perlindungan identitas Indonesia. Indonesia kini telah memiliki undang-undang kependudukan.<sup>7</sup>

a. Format Hubungan

Hubungan antara politik dan pendidikan terwujud ke dalam berbagai bentuk yang berbeda-beda, sesuai karakteristik setting sosial politik dimana hubungan itu terjadi. Bentuk hubungan tersebut berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam suatu masyarakat, hubungan tersebut bisa saja sangat kuat dan riil dan dalam masyarakat lainnya hubungan tersebut bisa saja lemah dan tidak nyata. Pola hubungan antara pendidikan dan politik di negara-negara berkembang berbeda-beda dari satu masyarakat ke masyarakat lainnya. Dalam masyarakat yang lebih primitif yang berdasarkan pada basis kesukuan (Tribal-based societies).

Dalam masyarakat yang lebih maju dan berorientasi teknologi, serta mengadopsi nilai-nilai dan lembaga-lembaga Barat, pola hubungan antara pendidikan dan politik berubah dari pola tradisional kepada pola modern. Dalam masyarakat modern pada umumnya, pendidikan adalah komoditi politik yang sangat penting. Pendidikan publik bersifat politis karena dikontrol oleh pemerintah dan memengaruhi kredibilitas pemerintah.

Karena kuatnya kaitan antara masalah pendidikan dan politik serta aspek-aspek publik lainnya, setiap kebijakan pemerintah di bidang pendidikan pada umumnya merefleksikan pandangannya tentang masyarakat dan keyakinan politiknya. Masing-masing pemerintah menempatkan prioritas pendidikan yang berbeda-beda, dan menyukai kebijakan-kebijakan yang merefleksikan pandangan dasar dan kepentingan-kepentingan mereka. Dari waktu ke waktu pemerintah membuat kebijakan-kebijakan pendidikan atas dasar

---

<sup>7</sup>. Yaya Suryana dan Rusdiana, *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip Dan Implementasi* (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2015), h.184-192.

pertimbangan-pertimbangan politik. Keputusan-keputusan tentang pendidikan sering dipengaruhi oleh faktor-faktor keuangan yang dihadapi oleh pemerintah. Sekolah-sekolah, universitas-universitas dan lembaga pendidikan negeri merupakan sektor publik yang paling terpengaruh oleh penerapan sistem politik. Ini tidak berarti bahwa lembaga-lembaga pendidikan non pemerintah tidak terpengaruh oleh keputusan-keputusan dan kontrol pemerintah. Karena pada umumnya sekolah-sekolah non pemerintah sangat tergantung pada subsidi negara, maka untuk mendapatkan subsidi pemerintah, sekolah-sekolah non pemerintah tersebut seringkali diharuskan oleh pemegang otoritas pendidikan untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti menyesuaikan struktur organisasi sekolah, merombak kurikulum, kriteria pengangkatan guru, prosedur pengelolaan dana, format akreditasi, tidak memasukkan bidang studi tertentu, tidak menggunakan buku pelajaran tertentu, menggunakan seragam tertentu, melaksanakan upacara-upacara tertentu dan sebagainya. Sekolah-sekolah non pemerintah yang sangat tergantung pada izin dan subsidi pemerintah tidak punya banyak pilihan selain mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah, walaupun dengan begitu tidak sedikit dari sekolah-sekolah tersebut harus “kehilangan identitas” atau terpaksa “lari” dari visi, misi, dan tujuan awal pendiriannya.

Di Indonesia, acungan jempol pantas diberikan kepada Pimpinan Pondok Modern Gontor karena ketegaran mereka untuk tidak mau mengikuti berbagai persyaratan yang dituntut oleh otoritas pendidikan di negeri ini. Hasil dari ketegaran tersebut sangat jelas; sementara banyak sekolah-sekolah dan pondok pesantren non pemerintah “kehilangan identitas” dan terjebak ke dalam uniformitas pendidikan yang diterapkan oleh otoritas pendidikan di tanah air. Selain itu, Pondok Modern Gontor adalah salah satu

dari sedikit institusi pendidikan di tanah air yang mendapat pengakuan internasional. Banyak lulusan Pondok Modern Gontor yang diterima di Al-Azhar, Mesir, dengan kewajiban mengikuti program matrikulasi yang sangat minim.

Jika politik dipahami sebagai “praktik kekuatan, kekuasaan dan otoritas dalam masyarakat, serta pembuatan keputusan-keputusan otoritas tentang alokasi sumber daya dan nilai-nilai sosial”, maka jelaslah bahwa pendidikan tidak lain adalah sebuah bisnis politik. Dengan kata lain, politik adalah bagian dari paket kehidupan lembaga-lembaga pendidikan. Hal ini menegaskan bahwa pendidikan dan politik adalah dua hal yang berhubungan erat dan saling memengaruhi. Dengan kata lain, berbagai aspek pendidikan senantiasa mengandung unsur-unsur politik, begitu juga sebaliknya, setiap aktifitas politik ada kaitannya dengan aspek-aspek kependidikan.

b. *Ide Non-Political School*

Meskipun hubungan atau keterkaitan antara politik dan pendidikan begitu kuat dan riil, tidak semua orang mengakui dan mendukung realitas tersebut. Banyak pihak yang resah dengan realitas tersebut dan menginginkan upaya-upaya perubahan untuk meminimalisasi atau mengikis elemen-elemen politik dalam dunia pendidikan. Mereka menginginkan agar pendidikan dan politik menjadi dua wilayah yang terpisah dan tidak berhubungan. Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat dilakukan untuk membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai kepentingan politik penguasa.

Perdebatan-perdebatan tentang pendidikan di kalangan politisi, pendidik, atau figur Australia sering membuat kesimpulan yang tak beralasan seperti ungkapan “*education is outside politics*” (pendidikan berada di luar politik) atau “*education should be taken*

out of politics altogether” (pendidikan harus sepenuhnya keluar dari politik). Ungkapan-ungkapan tersebut, lanjut Harman (1974: 4), muncul secara alamiah dari mulut sejumlah orang dan kebenarannya jarang dipertanyakan. Selain menghambat pemahaman profesional tentang relasi pendidikan dan politik, kata Harman (1974:1), pandangan bahwa politik dan pendidikan merupakan dua hal terpisah juga menghambat penelitian tentang fungsi-fungsi dan aspek-aspek politik pendidikan.

c. Politik Pendidikan Di Indonesia

Politik pendidikan yang dalam bahasa Inggris disebut *the politics of education* adalah bidang kajian yang relatif baru di Indonesia. Perkembangan kajian ini dipengaruhi beberapa hal antara lain; *sistem politik, perkembangan pendekatan penelitian, minat keilmuan, dan kultur akademik*. Sistem politik sangat menentukan perkembangan kajian politik pendidikan, karena karakteristik sistem politik menentukan ketersediaan informasi dan perkembangan wacana politik pendidikan. Namun tanpa bermaksud menapikan banyaknya praktik politik pendidikan yang baik dengan hasilnya yang juga baik, dan kita tidak bisa menutup mata bahwa masih banyak praktik politik pendidikan yang buruk yang berdampak buruk pula terhadap kinerja sistem pendidikan nasional. Praktik-praktik buruk politik pendidikan tersebut dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

*Pertama*, pendidikan dan kampanye politik. Yang seharusnya para politisi memanfaatkan kekuasaan mereka untuk mengkampanyekan program-program pendidikan. Akan tetapi di Indonesia sebaliknya dimana para politisi berupaya sedapat mungkin memanfaatkan isu-isu kependidikan untuk kampanye politik, dalam rangka mendongkrak popularitas mereka meraih kekuasaan politik.

*Kedua*, politisasi peraturan perundang-undangan. Banyaknya penguasa yang ingin memanfaatkan berbagai peraturan perundang-undangan pendidikan untuk kepentingan politik. *Ketiga*, kerancuan peraturan perundang-undangan. Banyaknya kepentingan politik praktis yang masuk ke wilayah pendidikan juga mengakibatkan proses penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan dalam bidang pendidikan sering tidak terkoordinir, sehingga sering terjadi tumpang tindih (overlapping), bertentangan (conflicting), dan inkonsisten sehingga kurang efektif dan sering menimbulkan mispersepsi dan konflik.

*Keempat*, program berbasis proyek, tidak berbasis riset. Saratnya kepentingan politik dalam program-program kependidikan membuat program-program tersebut tidak dipersiapkan dengan baik.

*Kelima*, politisasi pendanaan. Kewajiban mengalokasikan minimal 20% dari anggaran APBN dan APBD telah secara signifikan meningkatkan dana pendidikan. Tetapi efektifitas dan tersebut untuk pendidikan patut dipertanyakan.

*Keenam*, birokratisasi manajemen. Semakin hari, manajemen lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia, terutama yang berstatus negeri, tidak kreatif karena terkungkung oleh birokrasi yang ketat, baik dalam bidang administrasi pada umumnya maupun dalam bidang administrasi keuangan.

*Ketujuh*, lemahnya law enforcement. Banyaknya pertimbangan-pertimbangan politik dalam penyelenggaraan pendidikan membuat pemerintah tidak dapat bersikap tegas terhadap berbagai bentuk pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan pendidikan.<sup>8</sup>

Dari pandangan penulis dinamika hubungan politik pendidikan Islam pada negara-negara maju dan berkembang di dunia sangat

---

<sup>8</sup>. *Ibid.* H. 101-109

mempengaruhi satu sama lain yang dapat dilihat dari perkembangan sains dan teknologi sebagai wujud keberhasilan politik pendidikan. Sedangkan di Indonesia walaupun masih ada praktek-praktek buruk politik pendidikan tetapi ada upaya-upaya pembenahan. Dengan cara pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang baik untuk semua elemen pendidikan sedangkan pendidikan melakukan pembenahan-pembenahan dari bawah.

## 2. Prinsip-Prinsip Hubungan Politik Pendidikan Islam

Islam tidak memberikan batasan sistem pemerintahan, tetapi menyerahkan kepada umat untuk memilih dengan bebas sistem yang sesuai dengan kultur, lingkungan, zaman serta mengingat bahwa ajaran Islam adalah dakwah universal, cocok untuk segala zaman dan tempat. Setiap sistem pemerintahan Islam tidak bisa terlepas dari prinsip-prinsip politik dan perundang-undangnya pada al-Quran, karena al-Quran merupakan sumber pokok dari perundang-undangan tersebut. Baik dalam politik pendidikan, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Al-Quran memang tidak menyebutkan bagian perbagian secara terperinci. Hal tersebut tampaknya memang dibiarkan oleh Allah, agar lewat ijtihad umat Islam mampu mengembangkannya menjadi sistem politik dan perundang-undangan yang sesuai dengan kebutuhan waktu dan lingkungannya. Sumber pokok kedua adalah Sunnah yang merupakan petunjuk pelaksanaan yang secara umum melengkapi norma-norma yang ada dalam al-Quran. Karena itu prinsip-prinsip konstitusional dan politik terikat kepada kedua sumber tersebut. Karena kedua sumber itu memang menjadi pokok pegangan dalam segala aturan yang menyangkut seluruh aspek kehidupan setiap muslim.

Selain kedua sumber hukum tersebut, dalam sistem politik Islam juga terdapat sumber hukum- hukum *Qanuni*, yaitu yang bersumber dari lembaga-lembaga pemerintahan. Secara hirarki sumber hukum yang tertinggi dalam sistem ini adalah hukum yang pertama. Karena itu

kedaulatan hukum berada dalam al-Quran, karena di dalamnya terkandung kehendak Allah tentang tertib kehidupan manusia khususnya dan tertib alam semesta pada umumnya.

Adapun cita-cita politik seperti yang dijanjikan Allah kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh yang terkandung dalam al-Quran adalah (1) Terwujudnya sebuah sistem politik. (2) Berlakunya hukum Islam dalam masyarakat secara mantap. (3) Terwujudnya ketentraman dalam kehidupan masyarakat. Konsep-konsep politik Islam tercecer di berbagai tulisan yang tidak utuh. Konsep-konsep tersebut penting untuk dihadirkan mengingat kandungannya yang berbobot dan penting. Konsep-konsep politik Islam sangat variatif karena ditulis oleh berbagai ahli dengan latar belakang teologi dan pendidikan yang beragam. Efeknya, konsep politik Islam kaya rumusan dan gagasan.<sup>9</sup>

Namun walaupun dalam Islam terdapat peluang untuk politik secara lebih luas dalam hal kekuasaan harus tunduk terhadap hukum dan aturan Allah. Artinya Allah adalah penguasa terhadap segala sesuatu didalam semesta ini.<sup>10</sup>

Adapun Prinsip-prinsip Politik Menurut Al Quran Dalam Bermasyarakat dan Bernegara meliputi:

1. Kedudukan Manusia di atas Bumi terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 30.
2. Prinsip Manusia Sebagai Umat yang Satu terdapat dalam. Al-Baqarah ayat 213
3. Prinsip Menegakkan Kepastian Hukum dan Keadilan terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 135. Keadilan merupakan suatu prinsip yang harus ditegakkan dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, baik dibidang hukum, ekonomi, politik dan budaya terlebih bidang pendidikan. Karena sikap adil tersebut merupakan bagian dari pentingnya keberadaan suatu hukum dan menjadi etika politik. Dalam pandangan Al Razi dalam kitabnya *Mafathihul Ghaib* dia berkata, “para ulama telah bersepakat bahwa yang menjadi pemimpin diharuskan memerintah dengan adil”.<sup>11</sup>

<sup>9</sup>. Ija Suntana, *Kapita Selekta Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia), 2010, h. 5

<sup>10</sup>. [Http://naturalisi.blogspot.com/2012/12/politik-islam.html](http://naturalisi.blogspot.com/2012/12/politik-islam.html)

<sup>11</sup>. Muhammad Dhiauddin, *Teori Politik Islam*, ( Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h.266

4. Prinsip Kepemimpinan terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 59.
5. Prinsip Musyawarah terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 159
6. Prinsip Persatuan dan Persaudaraan terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 103
7. Prinsip Persamaan terdapat dalam QS. Al-Hujarat ayat 13
8. Prinsip Hidup Bertetangga/Hubungan antar Negara Bertetangga terdapat dalam QS. An-Nisa' ayat 36
9. Prinsip Tolong-Menolong dan Membela yang Lemah terdapat dalam QS. Surah Al-Maidah ayat 2
10. Prinsip Perdamaian dan Peperangan/Hubungan Internasional terdapat dalam QS. Al-Anfal ayat 61
11. Prinsip Ekonomi dan Perdagangan terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 275
12. Prinsip Administrasi dalam Perikatan/Muamalah terdapat dalam QS. A-Baqarah ayat 282
13. Prinsip Membela Negara terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 38
14. Prinsip Hak-Hak Asasi terdapat dalam
  - a. *Hak Untuk Hidup* Dalam QS. Al-Isra' ayat 33
  - b. *Hak Atas Milik Pribadi dan Mencari Nafkah* Dalam QS. An-Nisa' ayat 29
  - c. *Hak atas Penghormatan dan Kehidupan Pribadi* Dalam QS. An-Nur ayat 27
  - d. *Hak Berpendapat dan Berserikat* Dalam Surah An-Nisa' ayat 59
  - e. *Hubungan Kebebasan Beragama, Toleransi atas Agama dan Hubungan antar Pemeluk Agama* Dalam QS. Al-Baqarah ayat 256
  - f. *Hak Persamaan di depan Hukum dan Membela Diri* Dalam QS. An-Nisa' ayat 58
  - g. *Hak Kebebasan dari Penganiayaan* Dalam QS. Al-A'raf ayat 33
  - h. *Hak Kebebasan dari Rasa Takut* Dalam QS. Al-Maidah ayat 32
15. Prinsip Amar Ma'ruf dan Nahi Mungkar Dalam QS. Ali Imran ayat 110
16. Prinsip dalam Menetapkan Para Pejabat atau Pelaksanaan Suatu Urusan Dalam QS. Al-Qashash ayat 26

Dari 16 prinsip politik dalam Islam penulis menawarkan setidaknya ada 5 prinsip politik pendidikan yang bisa diterapkan dalam ranah politik kependidikan untuk menunjang keberhasilan tujuan sistem pendidikan nasional yang bermutu, yaitu :

1. Kedudukan manusia sebagai pemimpin, adanya prinsip kepemimpinan maka politik pendidikan akan berjalan dengan baik.
2. Prinsip kepemimpinan harus diwujudkan dengan menegakkan kepastian hukum dan keadilan yang teradministrasi

3. Segala kebijakan yang dihasilkan atas dasar prinsip musyawarah
4. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan harus berorientasi pada prinsip Amar ma'ruf (perintah pada kebaikan-kebaikan)
5. Sedangkan prinsip amar ma'ruf sebagai wujud dari hak asasi manusia.

### 3. Mutu Pendidikan

#### a. Pengertian Mutu Pendidikan

Secara etimologi, mutu atau kualitas diartikan dengan kenaikan tingkatan menuju suatu perbaikan atau kemapanan. Sebab kualitas mengandung makna bobot atau tinggi rendahnya sesuatu. Jadi dalam hal ini kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan.<sup>12</sup> Menurut Supranta kualitas adalah sebuah kata yang bagi penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik.<sup>13</sup> Sebagaimana yang telah dipaparkan oleh Guets dan Davis dalam bukunya Tjiptono menyatakan kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan.<sup>14</sup> Kualitas pendidikan menurut Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar merupakan kemampuan lembaga pendidikan dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar seoptimal mungkin.<sup>15</sup>

Di dalam konteks pendidikan, pengertian kualitas atau mutu dalam hal ini mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dari konteks “proses” pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input (seperti bahan ajar: kognitif, afektif dan, psikomotorik), metodologi (yang bervariasi sesuai dengan kemampuan guru), sarana sekolah,

---

<sup>12</sup>. Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar Di Daerah Diseminasi oleh A. Supriyanto, November 1997, Jilid 4, IKIP, 1997.h.225

<sup>13</sup>. Supranta. J, *Metode Riset*, (PT Rineka Cipta, Jakarta, 1997), h, 288

<sup>14</sup>. Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa Edisi I Cet II*, (Andi Offcet, Yogyakarta, 1995), h. 51

<sup>15</sup>. Ace Suryadi dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, (PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993). h. 159

dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif. Dengan adanya manajemen sekolah, dukungan kelas berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar, baik antara guru, siswa dan sarana pendukung di kelas atau di luar kelas, baik dalam konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkungan substansi yang akademis maupun yang non akademis dalam suasana yang mendukung proses belajar pembelajaran.

Pendidikan atau sekolah yang berkualitas disebut juga sekolah yang berprestasi, sekolah yang baik atau sekolah yang sukses, sekolah yang efektif dan sekolah yang unggul. Sekolah yang unggul dan bermutu itu adalah sekolah yang mampu bersaing dengan siswa di luar sekolah. Juga memiliki akar budaya serta nilai-nilai etika moral (akhlak) yang baik dan kuat.<sup>16</sup>

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kualitas atau mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga dan sistem pendidikan dalam memberdayakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kualitas yang sesuai dengan harapan atau tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang efektif. yang mampu menjadi pelopor pembaruan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan permasalahan yang dihadapinya, baik di masa sekarang atau di masa yang akan datang (harapan bangsa).

#### **b. Standar atau Parameter Pendidikan Yang Berkualitas**

Standar/ parameter adalah ukuran atau barometer yang digunakan untuk menilai atau mengukur sesuatu hal. Ini menjadi penting untuk kita ketahui, apalagi dalam rangka mewujudkan suatu pendidikan yang berkualitas. Kalau kita mengacu pada Peraturan Pemerintah

---

<sup>16</sup>. Abdul Chafidz, *Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya*, MPA No. 142, Juli 1998, h.39

(PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Standar nasional pendidikan diatas, ada delapan (8) hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu :<sup>17</sup>

- a) Standar isi, adalah ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi yang dituangkan dalam kriteria tentang kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi oleh peserta didik pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
- b) Standar proses, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
- c) Standar pendidik dan tenaga kependidikan, adalah kriteria pendidikan prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan.
- d) Standar sarana dan prasarana, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.
- e) Standar pengelolaan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional, agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.
- f) Standar pembiayaan, adalah standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun.
- g) Standar penilaian pendidikan, adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Standar nasional pendidikan ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.<sup>18</sup> Juga bertujuan untuk menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta

---

<sup>17</sup>. Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I, Pasal 1.

<sup>18</sup>. *Ibid*, pasal 3.

peradaban bangsa yang bermartabat.<sup>19</sup> Salah satu standar diatas yang paling penting untuk diperhatikan yaitu standar pendidik dan kependidikan. Dimana seorang pendidik harus memiliki kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini, yaitu :<sup>20</sup> Kompetensi peadagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial.

Ada empat (4) standar kualitas pendidikan dalam urutan prioritasnya adalah sebagai berikut : guru (teacher), kurikulum (curriculum), atmosfer akademik (academic atmosphere), dan sumber keilmuan (academic resource).<sup>21</sup>

#### **4. Upaya Untuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan**

##### **a. Peningkatan Kualitas Guru**

Guru yang memiliki posisi yang sangat penting dan strategi dalam pengembangan potensi yang dimiliki peserta didik. Pada diri gurulah kejayaan dan keselamatan masa depan bangsa dengan penanaman nilai-nilai dasar yang luhur sebagai cita-cita pendidikan nasional dengan membentuk kepribadian sejahtera lahir dan bathin, yang ditempuh melalui pendidikan agama dan pendidikan umum. Oleh karena itu harus mampu mendidik diperbagai hal, agar ia menjadi seorang pendidik yang profesional. Sehingga mampu mendidik peserta didik dalam kreativitas dan kehidupan sehari-harinya. Untuk meningkatkan profesionalisme pendidik dalam pembelajaran, perlu ditingkatkan melalui cara-cara sebagai berikut:

- 1) Mengikuti Penataran, kegiatan penataran itu sendiri di tujukan:
  - a) Mempertinggi mutu petugas sebagai profesinya masing-masing.

---

<sup>19</sup>. *Ibid*, pasal 4.

<sup>20</sup>. *Ibid*, pasal 28.

<sup>21</sup>. [www.sigmetris.com / artikel=21.html](http://www.sigmetris.com/artikel=21.html), Standar Kualitas Pendidikan Metris By. Alexander Agung.

- b) Meningkatkan efesiensi kerja menuju arah tercapainya hasil yang optimal.
- c) Perkembangan kegairahan kerja dan peningkatan kesejahteraan.<sup>22</sup>
- 2) Mengikuti Kursus-Kursus Pendidikan
- 3) Memperbanyak Membaca
- 4) Mengadakan Kunjungan Kesekolah Lain (studi komperatif)
- 5) Mengadakan Hubungan Dengan Wali Siswa

#### **b. Peningkatan Materi**

Dalam rangka peningkatan pendidikan maka peningkatan materi perlu sekali mendapat perhatian karena dengan lengkapnya materi yang diberikan tentu akan menambah lebih luas akan pengetahuan. Hal ini akan memungkinkan peserta didik dalam menjalankan dan mengamalkan pengetahuan yang telah diperoleh dengan baik dan benar. Materi yang disampaikan pendidik harus mampu menjabarkan sesuai yang tercantum dalam kurikulum. Pendidik harus menguasai materi dengan ditambah bahan atau sumber lain yang berkaitan dan lebih actual dan hangat. Sehingga peserta didik tertarik dan termotivasi mempelajari pelajaran.

#### **c. Peningkatan dalam Pemakaian Metode**

Metode merupakan alat yang dipakai untuk mencapai tujuan, maka sebagai salah satu indicator dalam peningkatan kualitas pendidikan perlu adanya peningkatan dalam pemakaian metode. Yang dimaksud dengan peningkatan metode disini, bukanlah menciptakan atau membuat metode baru, akan tetapi bagaimana caranya penerapannya atau penggunaanya yang sesuai dengan materi yang disajikan, sehingga memperoleh hasil yang memuaskan dalam proses belajar mengajar. Pemakaian metode ini hendaknya bervariasi sesuai dengan materi yang akan disampaikan sehingga peserta didik tidak akan merasa bosan dan jenuh atau monoton.

---

<sup>22</sup>. *Ibid*, h.116

#### **d. Peningkatan Sarana**

Sarana adalah alat atau metode dan teknik yang dipergunakan dalam rangka meningkatkan efektivitas komunikasi dan interaksi edukatif antara pendidik dan peserta didik dalam proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.<sup>23</sup> Semua sekolah meliputi peralatan dan perlengkapan tentang sarana dan prasarana, ini dijelaskan dalam buku “Admitrasi Pendidikan” yang disusun oleh Tim Dosen IP IKIP Malang menjelaskan: sarana sekolah meliputi semua peralatan serta perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah.<sup>24</sup>

#### **e. Peningkatan Kualitas Belajar**

Karena dalam setiap proses belajar mengajar yang dialami peserta didik selamanya lancar seperti yang diharapkan, kadang-kadang mengalami kesulitan atau hambatan dalam belajar.

### **C. PENUTUP**

Dinamika Hubungan Politik Pendidikan Islam di banyak negara maju berkembang, dimana pengaruh modernisasi sangat kuat, pola hubungan politik dan pendidikan Islam umumnya sama dengan hubungan pendidikan dan politik di negara-negara Barat. Kedudukan politik di dalam Islam sama pentingnya dengan pendidikan. Tanpa otoritas politik, syari’at Islam sulit bahkan mustahil untuk ditegakkan. Kekuasaan adalah sarana untuk mempertahankan syiar Islam. Pendidikan bergerak dalam usaha menyadarkan umat untuk menjalankan syari’at. Umat tidak akan mengerti syari’at tanpa adanya pendidikan.

Prinsip-Prinsip Politik Pendidikan Islam Menurut Al Qur’an Dalam Bermasyarakat dan Bernegara meliputi 16 prinsip dan ada 5 prinsip utama

---

<sup>23</sup>, Roestiyah N.K, *Masalah Ilmu Keguruan*, (Bina Aksara, Jakarta, 2015), h.67

<sup>24</sup>. Tim Dosen Jurusan *Administrasi Pendidikan* (FIP IKIP Malang, 1997). h.135

dalam politik pendidikan yang ditawarkan yang dapat diterapkan dalam ranah politik kependidikan untuk menunjang keberhasilan tujuan sistem pendidikan nasional yang bermutu, yaitu : *Pertama*, Kedudukan manusia sebagai pemimpin, adanya prinsip kepemimpinan maka politik pendidikan akan berjalan dengan baik. *Kedua*, Prinsip kepemimpinan harus diwujudkan dengan menegakkan kepastian hukum dan keadilan yang teradministrasi. *Ketiga*, Segala kebijakan yang dihasilkan atas dasar prinsip musyawarah. *Keempat*, Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan harus berorientasi pada prinsip Amar ma'ruf (perintah pada kebaikan-kebaikan). *Kelima*, prinsip amar ma'ruf sebagai wujud dari hak asasi manusia.

Mutu Pendidikan/Kualitas pendidikan adalah pelaksanaan pendidikan disuatu lembaga, sampai dimana pendidikan di lembaga tersebut telah mencapai suatu keberhasilan. Standar nasional pendidikan diatas, ada delapan (8) hal yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas, yaitu : standar isi, standar proses, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar penilaian pendidikan. Adapun upaya peningkatan kualitas pendidikan dapat di tempuh dengan beberapa cara antara lain: peningkatan kualitas guru, peningkatan materi, peningkatan dalam pemakaian metode, peningkatan sarana, peningkatan kualitas belajar.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

Abdul Chafidz, *Sekolah Unggul Konsepsi dan Problematikanya*, MPA No. 142. 1998

Al Barry, M. Dahlan. *Kamus Modern Bahasa Indonesia*, Arloka, Yogyakarta. 2001

Dhiauddin, Muhammad. *Teori Politik Islam*. Gema Insani Press. Jakarta. 2001

Jumhur, *Bimbingan Dan Penyuluhan Di Sekolah*, Rajawali Pres, Jakarta. 2001

Mubaraq, Zulfi. *Sosiologi Agama* . UIN Press. Malang. 2010

Peraturan Pemerintah (PP.) No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Bab I, Pasal 1.

Roestiyah N.K, *Masalah Ilmu Keguruan*, Bina Aksara, Jakarta. 2015

Sirozi, Muhammad, *Konteks dan kerangka konseptual kajian politik pendidikan*. Palembang Noer Fikri Offset. Palembang. 2013

Sirozi, Muhammad, *Politik Pendidikan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010

Suntana, Ija, *Kapita Selekta Politik Islam*. Pustaka Setia.Bandung. 2010

Supranta. J, *Metode Riset*, PT Rineka Cipta, Jakarta. 1997

Suprpto, Sri, *Landasan Aksiologis Sistem Pendidikan Nasional Indonesia dalam Perspektif Filsafat Pendidikan*. *Cakrawala Pendidikan* (Jurnal Ilmiah Pendidikan, Juni 2013, Th.XXXII, No.2). Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta. 2013

Supriyanto. *Jurnal Ilmu Pendidikan Mutu Pendidikan Sekolah Dasar* IKIP. 1997

Suryadi, Ace. dan H.A.R Tilaar, *Analisis Kebijakan Pendidikan Suatu Pengantar*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung. 1993

Suryana Yaya & Rusdiana, *Pendidikan Multikultural Suatu Upaya Penguatan Jati Diri Bangsa Konsep, Prinsip Dan Implementasi*. CV Pustaka Setia. Bandung. 2015

Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho, *Kebijakan Pendidikan*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta. 2012

Tjiptono, Fandy, *Manajemen Jasa* Edisi I Cet II, Andi Offcet, Yogyakarta. 1995

Umaedi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, Direktorat Pendidikan Menengah dan Umum. 1999

Zainal, Arifin, *Pengembangan Manajemen Mutu Kurikulum Pendidikan Islam*. Diva Press.Yogyakarta. 2012

<http://ammanurrahmahmo.blogspot.com/2011/06/siyasah.html>

<http://naturalisi.blogspot.com/2012/12/politik-islam.html>

[http://www.sigmetris.com / artikel=21.html](http://www.sigmetris.com/artikel=21.html), Standar Kualitas Pendidikan Metris By. Alexander Agung.